

# Laut untuk Kesejahteraan

Laut sangat penting bagi kesejahteraan Indonesia melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti perikanan tangkap dan budi daya, wisata pantai, dan transportasi.



Ekonomi biru Indonesia, yang **terbesar di Asia Tenggara**, bernilai **US\$256 miliar** per tahun atau **lebih dari seperempat PDB**.<sup>1</sup>



Indonesia adalah **produsen perikanan laut dan rumput laut terbesar kedua di dunia**.<sup>2</sup> Sektor ini memberikan kontribusi sebesar **US\$27 miliar** terhadap perekonomian nasional, menyediakan lebih dari **tujuh juta lapangan pekerjaan** dan **setengah protein yang dikonsumsi masyarakat Indonesia**.<sup>3</sup>



Laut Indonesia adalah aset utama pariwisata nasional, bernilai sekitar **US\$12 miliar** pada tahun 2017 – **sumber devisa terbesar keempat** – dan menyediakan **10,5 persen lapangan kerja**.<sup>4</sup>



**Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia**, yang memberikan kontribusi lebih dari 61% dari PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha,<sup>5</sup> dengan prevalensi tinggi di kawasan pesisir.

**Laut yang sehat dapat mengatur iklim**, menyerap gas rumah kaca, memasok oksigen, dan menjadi habitat bagi ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati.



Lamun dan mangrove Indonesia **menyimpan sekitar 3,4 miliar ton karbon**, lima kali lipat lebih besar dibandingkan dengan hutan tropis berbasis lahan.<sup>6</sup>



Mangrove, terumbu karang, dan lamun berperan penting dalam rantai makanan dan siklus perkembangan bagi banyak spesies ikan yang penting bagi tangkapan ikan komersial dan ketahanan pangan Indonesia. Sebagai contoh, di desa-desa di Sulawesi Tenggara, **tangkapan ikan yang hidup di ekosistem lamun menyumbang lebih dari separuh asupan protein harian di kawasan tersebut**.<sup>7</sup>



Ekosistem terumbu karang di Indonesia menyimpan **17 persen cadangan karbon biru dunia**.

<sup>1</sup> OECD. (2021). "Sustainable Ocean Economy Country Diagnostic of Indonesia."

<sup>2</sup> FAO. (2022) The State of World Fisheries and Aquaculture.

<sup>3</sup> World Bank (2021) Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia.

<sup>4</sup> Spalding, M. et al. (2017). "Mapping the global value and distribution of coral reef tourism."

<sup>5</sup> Ministry of MSMEs (2021): <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.

<sup>6</sup> Alongi, D.M., D. Muryasoro, J.W. Fourqurean, J.B. Kauffman, A. Hutahaean, S. Crooks, C.E. Lovelock, et al. 2016. "Indonesia's Blue Carbon: A Globally Significant and Vulnerable Sink for Seagrass and Mangrove Carbon." Wetlands Ecology and Management 24: 3-13. <https://doi.org/10.1007/s11273-015-9446-y>.

<sup>7</sup> Ursworth, R.K.F., S.L. Hinder, O.G. Bodger, L.C. Cullen-Ursworth. 2014. "Food Supply Depends on Seagrass Meadows in the Coral Triangle." Environmental Research Letters (September). <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/9/094005>.

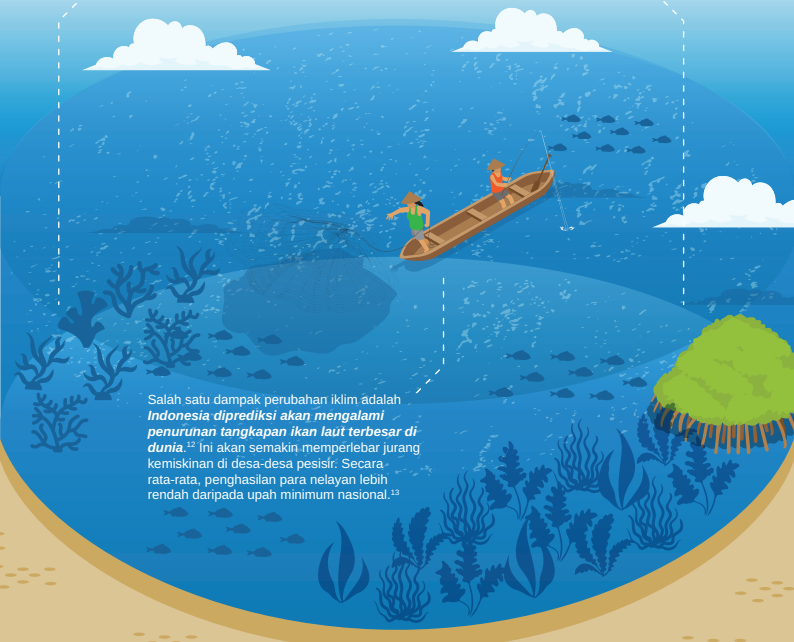
## Jika tidak dikelola, tantangan yang berkaitan dengan integritas ekosistem laut dan pesisir Indonesia dapat menghambat potensi ekonomi laut Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah kehilangan sekitar **20-50%** terumbu karang.<sup>8</sup>

PBB memperkirakan bahwa **90 persen terumbu karang dunia akan punah pada tahun 2050** apabila tidak ada tindakan yang diambil untuk mengurangi ancaman tersebut.<sup>9</sup>

**1/3** terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi yang tidak baik,<sup>10</sup>

dan sekitar **40%** dari hutan mangrove dan lamun di Indonesia berada dalam keadaan terdegradasi atau hilang.<sup>11</sup>



Salah satu dampak perubahan iklim adalah **Indonesia diprediksi akan mengalami penurunan tangkapan ikan laut terbesar di dunia**.<sup>12</sup> Ini akan semakin memperlebar jurang kemiskinan di desa-desa pesisir. Secara rata-rata, penghasilan para nelayan lebih rendah daripada upah minimum nasional.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Eddy, T.D., Lam, V.W., Reygondeau, G., Cisneros-Montemayor, A.M., Greer, K., Palomares, M.L.D., Bruno, J.F., Ota, Y. and Cheung, W.W., 2021. Global Decline in Capacity of Coral Reefs to Provide Ecosystem Services. *One Earth*, 4(9), pp.1278-1285.

<sup>9</sup> Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H.O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P.R., Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., Pidcock, R. and Connors, S., 2018. Global Warming of 1.5 C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C.

<sup>10</sup> IPI (Indonesian Institute of Sciences), 2020. The Status of Indonesian Coral Reefs 2019. Jakarta, Indonesia.

<sup>11</sup> Unsworth, R.K.F., R. Ambo-Regge, B.L. Jones, Y.A. La Nafie, A. Inawan, U.E. Hermawan, A.M. Moore, et al. 2018. "Indonesia's Globally Significant Seagrass Meadows are Under Widespread Threat." *Sci Total Environ* 634 (September): 279-86. <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.315>

<sup>12</sup> Cheung, W.W., Lam, V.W., Samiento, J.L., Kearney, K., Watson, R.E.G., Zeller, D. and Pauly, D. (2010). Large-Scale Redistribution of Maximum Fisheries Catch Potential in the Global Ocean Under Climate Change. *Global Change Biology* 16:24-35.

<sup>13</sup> Cahagi, D., and Gerning, R. (2018). "A Review on Indonesian Fishermen Prosperity in the Coastal Area."

**Tantangan dalam jangka panjang dan jangka pendek yang dihadapi oleh sektor kelautan di Indonesia dapat ditangani melalui strategi ekonomi laut yang berkelanjutan; Pemerintah Indonesia sedang menjalankan strategi ini melalui berbagai inisiatif, termasuk dengan meningkatkan efektivitas Kawasan Konservasi Perairan (KKP).**

### Bagaimana cara mengelola KKP secara efektif?

KKP yang efektif adalah KKP yang telah menetapkan target – seperti keanekaragaman hayati, sosial dan ekonomi – dan terbukti mencapai target tersebut.



Pemerintah Indonesia menargetkan untuk meningkatkan luasan KKP menjadi 32,5 juta ha yang **dikelola secara efektif** pada tahun 2030.

### Bagaimana kita dapat mewujudkan KKP yang efektif?

**Infrastruktur dan kapasitas untuk pengelolaan yang efektif sudah tersedia**



**Integrasi yang lebih baik ke dalam rencana pengelolaan perikanan yang lebih luas**



**Pemangku kepentingan lokal aktif terlibat dalam pengelolaan KKP dan masyarakat mendapat manfaat dari KKP.**



**Penerapan sistem zonasi, termasuk kawasan yang dialokasikan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, sektor perikanan dan budi daya.**



**Aturan KKP diterapkan**



**Pemantauan dan evaluasi dilakukan:** Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) belum lama ini telah diterbitkan untuk mendukung pencapaian target dan untuk memastikan bahwa KKP memberikan manfaat biosfisik dan sosioekonomi yang ditargetkan.

**Akses ke blue finance tersedia** untuk mengelola KKP dan secara khusus ditargetkan untuk operasional KKP dan investasi modal serta infrastruktur untuk mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir dan rantai nilai.

# Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)

Proyek Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) berupaya untuk meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan terumbu karang secara berkelanjutan, sembari meningkatkan akses ke mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat di Indonesia Timur. Proyek ini dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Pengelolaan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia (US\$200 juta), PROBLUE (US\$5 juta), dan Pemerintah Kanada (US\$7,3 juta) melalui Oceans, Marine Debris and Coastal Resources Multi-Donor Trust Fund.

Proyek ini akan:

Mebiayai

4

komponen

Dijalankan di

20

KKP dan 75 desa sekitarnya

Berlokasi di

11

Provinsi di Indonesia Timur

## Komponen 1

Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Berkelanjutan – dipimpin oleh KKP.

Komponen 1 akan memperkuat pengelolaan berbasis ekosistem dan partisipatif untuk 20 KKP (**seluas 8,3 juta ha**) dan perikanan terumbu karang terpilih di dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sasaran.

## Komponen 2

Perluasan peluang ekonomi di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi Perairan – dipimpin oleh KKP.

Komponen 2 akan meningkatkan nilai dan manfaat yang diperoleh masyarakat setempat dari sumber daya laut di dalam dan sekitar KKP dengan berbagai pendekatan untuk meningkatkan akses ke mata pencaharian, khususnya di sektor pariwisata, perikanan, dan budi daya.

## Komponen 4

Pengelolaan Proyek

## Komponen 3

Pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi perairan dan mata pencaharian – dipimpin oleh BAPPENAS melalui ICCTF bekerja sama dengan KKP.

Komponen 3 akan meningkatkan kerangka kebijakan dan kapasitas pemerintah dalam memobilisasi *blue financing* jangka panjang untuk: (a) operasi KKP dan investasi modal; (b) membangun infrastruktur pesisir yang berdampak positif bagi keanekaragaman hayati; dan (c) meningkatkan akses pembiayaan UMKM

